

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan merupakan masalah yang selalu menjadi persoalan di beberapa Negara berkembang. Di Indonesia sendiri, kemiskinan telah lama menjadi persoalan dan sampai dengan saat ini belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir. Kemiskinan adalah keadaan di mana seseorang ataupun kelompok mengalami kekurangan atau ketidakmampuan secara ekonomi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar yang berhubungan dengan hal-hal pemenuhan kualitas hidupnya, seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan pendidikan.

Menurut Nugroho dan Dahuri (2012), kemiskinan merupakan suatu kondisi absolute atau relatif di suatu wilayah di mana seseorang atau kelompok masyarakat tidak mampu mencukupi kebutuhan dasarnya sesuai tata nilai atau norma yang berlaku. Jika di pandang dari aspek ekonomi, kemiskinan menunjuk pada gap antara lemahnya *purchasing power* dan keinginan dalam memenuhi kebutuhan dasar. Kemiskinan bias disebabkan oleh terbatasnya sumber daya manusia yang ada, baik lewat jalur pendidikan formal maupun non formal yang pada akhirnya menimbulkan konsekuensi terhadap rendahnya pendidikan informal. Permasalahan kemiskinan merupakan permasalahan yang kompleks dan bersifat multidimensional, Oleh karena itu, upaya pengentasan

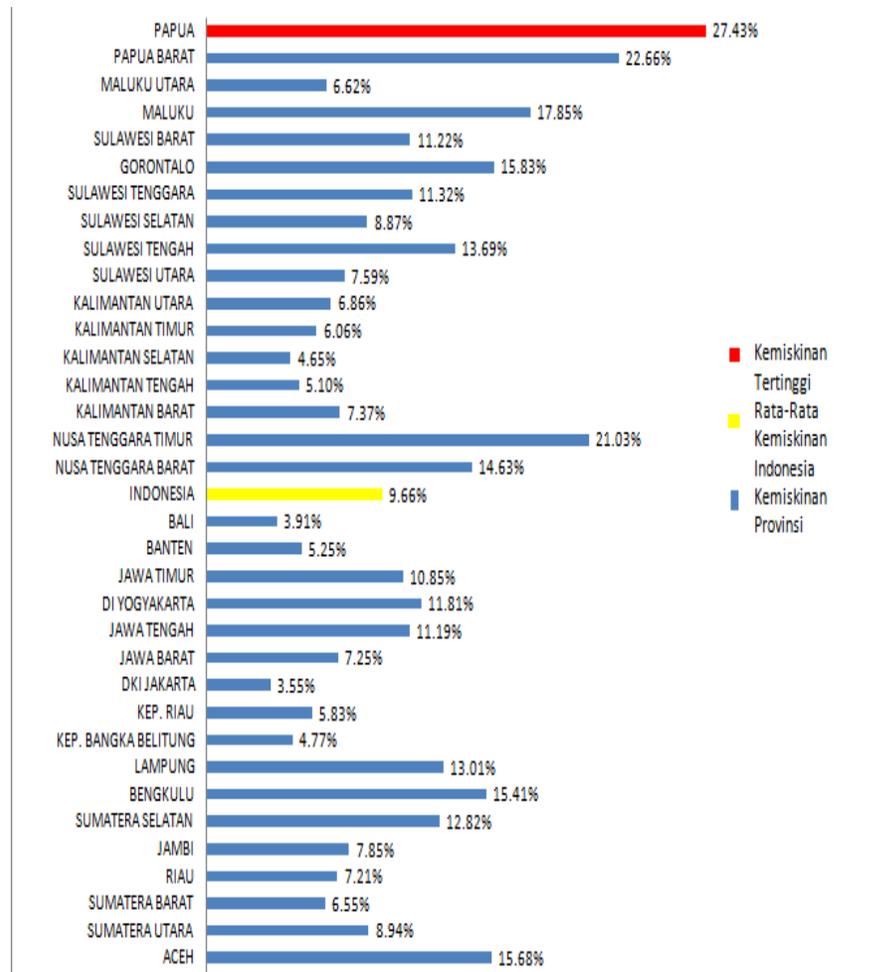
Kemiskinan harus dilakukan secara komprehensif, mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat, dan dilaksanakan secara terpadu (M. Nasir, dkk, dalam Adit Agus Prastyo, 2010).

Kemiskinan disebabkan oleh beberapa hal, yaitu lajunya pertumbuhan penduduk, tingkat pendidikan, pengangguran, dan masih banyak lagi. Lajunya pertumbuhan penduduk, membuat kemiskinan menjadi meningkat karena jumlah penduduk yang bekerja tidak sebanding dengan jumlah beban ketergantungan. Kemudian kemiskinan selalu dikaitkan dengan rendahnya tingkat pendidikan karena tidak mampu seseorang dalam mencapai pendidikan yang tinggi sehingga menyebabkannya kurang akan pengetahuan ataupun kurangnya skill dalam bekerja. Masalah rendahnya tingkat pendidikan dapat mengakibatkan timbulnya pengangguran.

Kemiskinan dapat memberikan dampak negative bagi masyarakat, selain mengalami kekurangan dalam memenuhi sandang dan pangan, kemiskinan juga dapat membuat tingginya tingkat kriminalitas. Karena jumlah pengangguran yang banyak maka akan menyebabkan orang-orang tersebut mencari uang dengan cara pintas seperti mencuri dan juga menipu.

Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh Negara ini adalah kemiskinan, sejauh ini pihak pemerintah belum mampu menghadapi atau menyelesaikan permasalahan tersebut, padahal setiap mereka yang memimpin Negara Indonesia selalu membawa misi utamanya adalah kemiskinan disamping misi-misi yang lain. Pada bulan Maret tahun 2018 BPS

mencatat angka kemiskinan di Indonesia mencapai 9,82%, jumlah penduduk miskin atau yang pengeluarannya per kapita tiap bulan di bawah garis kemiskinan mencapai 25,95 juta orang.



Sumber : Badan Pusat Statistik Nasional 2018

Gambar 1.1 Presentase Angka Kemiskinan 33 Provinsi di Indonesia

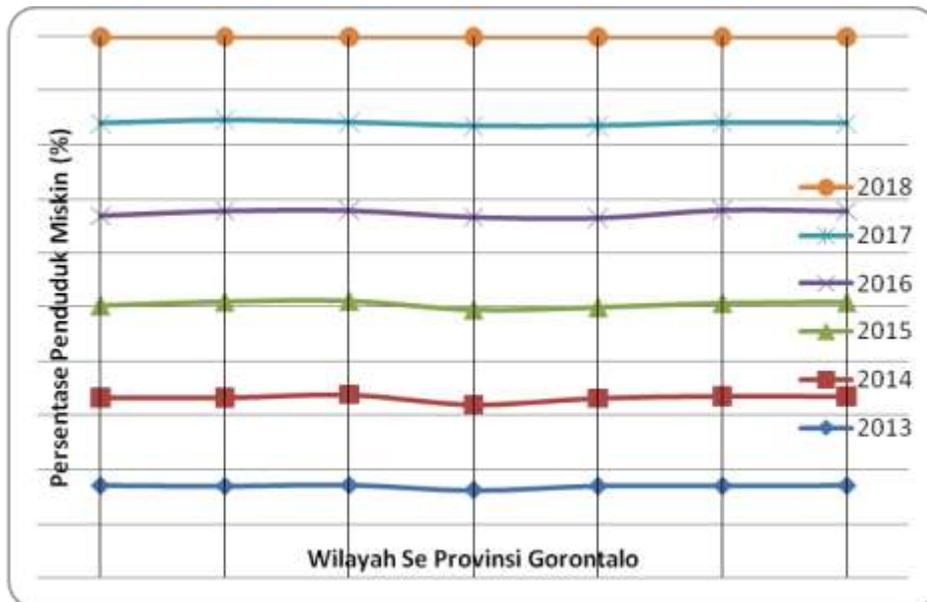
September 2018

Grafik di atas menunjukkan bahwa berdasarkan uraian angka kemiskinan 33 Provinsi di Indonesia, angka kemiskinan di Provinsi Gorontalo cukup tinggi. Angka kemiskinan di Provinsi Gorontalo pada September 2017 lalu adalah 17,14% dan pada bulan September tahun 2018 dilaporkan turun menjadi 15,83%. Turun 1,31% dibandingkan tahun 2017 kemarin. Jumlah penduduk miskin tahun 2018 di Provinsi Gorontalo sebanyak 200,91 ribu jiwa, sementara jumlah penduduk miskin Maret 2018 sebanyak 198,51 ribu jiwa. Dengan demikian jumlah penduduk miskin di Provinsi Gorontalo selama periode September 2017-Maret 2018 berkurang sebanyak 2,4 ribu jiwa. Pengurangan angka kemiskinan ini disebabkan oleh beberapa hal seperti adanya peningkatan perkapita, adanya beberapa program-program penanggulangan kemiskinan.

Tabel 1.1 Presentase Penduduk Miskin Di Provinsi Gorontalo
Tahun 2013 – 2017

NO.	Wilayah Se Provinsi	Presentase Penduduk Miskin (%)					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Boalemo	21.79	20.79	21.67	21.11	21.85	20.33
2	Pohuwato	21.47	20.69	22.43	21.17	21.27	19.4
3	Kab. Gorontalo	21.57	21.05	21.8	21.03	20.55	19.84
4	Bone Bolango	17.19	16.68	18.49	17.97	17.81	17.4
5	Gorontalo Utara	19.16	18.34	18.93	18.51	19.23	18.54
6	Kota Gorontalo	5.99	5.85	6.05	6.05	5.7	5.57
7	ProvinsiGorontalo	18	17.41	18.32	17.72	17.14	16.81

Data Sekunder : BPS Provinsi Gorontalo 2018



Gambar1.2 Presentase Kemiskinan di Provinsi Gorontalo

Berdasarkan data di atas persentase penduduk miskin di Provinsi Gorontalo pada bulan Maret 2018 mengalami penurunan sebesar 16,81% jika dibandingkan dengan persentasi pada tahun 2017 yaitu sebesar 17,14%. Garis kemiskinan Provinsi Gorontalo pada September 2017 sebesar Rp. 307.707,- per kapita per bulan, yang berarti naik sebesar Rp. 8.589,- per kapita per bulan, atau naik sebesar 2,79%. Bila dibedakan garis kemiskinan daerah perkotaan dan pedesaan, maka garis kemiskinan di perkotaan Maret 2018 sebesar Rp. 318.195,- per kapita per bulan dan garis kemiskinan di pedesaan sebesar Rp. 314.727,- per kapita per bulan. Dapat dikatakan bahwa persentase kemiskinan di perkotaan mengalami peningkatan, sedangkan di daerah pedesaan mengalami penurunan.

Data diatas dapat dikatakan bahwa persentase penduduk miskin di Provinsi Gorontalo masih cukup tinggi. Berdasarkan data yang ada, diketahui bahwa tingkat kemiskinan di Provinsi Gorontalo pada tahun 2016 mengalami penurunan dari 17,72% menjadi 17,14% pada 2017. Struktur ekonomi Provinsi Gorontalo pada tahun 2017 menurut data yang dirilis BPS yaitu dari sisi pengeluaran didominasi oleh komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga dengan kontribusi sebesar 61,43% sedangkan dari sisi produksinya didominasi oleh kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dengan kontribusi 38,01%.

Banyak program yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Gorontalo untuk menanggulangi masalah kemiskinan, di antaranya Program Pengembangan Ekonomi Produktif Masyarakat Miskin, Program Kesejahteraan Rakyat, Program Penanganan Fakir Miskin, Program Penyediaan Rumah Hunian Layak Bagi Masyarakat Miskin, Korban Bencana dan Dampak Pembangunan Provinsi, Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan dan masih banyak lagi program yang di jalankan pemerintah Provinsi Gorontalo dalam menanggulangi kemiskinan yang menyedot biaya yang mencapai milyaran rupiah. Meskipun pemerintah telah berupaya semaksimal mungkin untuk memberantas kemiskinan, akan tetapi tidak menunjukkan dampak yang efektif untuk menurunkan tingkat kemiskinan di Provinsi Gorontalo.

Pada tahun 2018 Pemerintah Provinsi Gorontalo membuat program baru untuk mengentaskan kemiskinan yaitu Bantuan Pangan Non Tunai Daerah (BPNT-D). BPNT-D adalah bantuan pangan dari pemerintah yang diberikan kepada KPM (Keluarga Penerima Manfaat) setiap bulannya melalui Mekanisme akun Elektronik yang digunakan hanya untuk membeli pangan di e-Warong KUBE PKH/pedagang bahan pangan yang bekerja sama dengan Bank Penyalur. Jumlah masyarakat Provinsi Gorontalo yang menerima BPNT-D sekitar 35.000 kepala keluarga. di Provinsi Gorontalo sendiri pihak pemerintah terkait bekerja sama dengan agen Brilink, sehingganya untuk lokasi atau tempat pengambilan bantuan tersebut melalui semua agen brilink yang ada di Provinsi Gorontalo.

BPNT-D sendiri bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran serta memberikan nutrisi yang lebih seimbang kepada KPM (Keluarga Penerima Manfaat) secara tepat sasaran dan tepat waktu. Kriteria penerima BPNT di lihat dari; masyarakat dengan jenjang pendidikan tertinggi SD, pekerjaan utama kepala keluarga adalah petani, keluarga yang dalam seminggu tidak pernah mengonsumsi daging dan susu.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Badan Pusat Statistik (BPS) bulan maret 2018 mencatat angka kemiskinan di Indonesia mencapai 9,42%

2. Angka kemiskinan di Provinsi Gorontalo pada tahun 2018 sebesar 16,81%
3. Rendahnya penurunan tingkat kemiskinan setiap tahunnya
4. Belum efektifnya program penanggulangan kemiskinan di Provinsi Gorontalo pada tahun-tahun sebelumnya
5. Tidak signifikannya penurunan kemiskinan disebabkan oleh banyak hal seperti bantuan yang salah sasaran dan penerima bantuan yang tidak menggunakan sesuai kegunaannya.
6. Pemerintah mengadakan program BPNT-D untuk menurunkan tingkat kemiskinan.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :Bagaimana Dampak Program Bantuan Pangan Non Tunai Daerah (BPNT-D) terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Gorontalo ?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian adalah: Untuk mengetahui dampak dari Program Bantuan Pangan Non Tunai Daerah (BPNT-D) terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Gorontalo.

1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, manfaat dari penelitian ini dibagi menjadi dua bagian yaitu sebagai berikut :

1. Secara Teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan teori atau ilmu pengetahuan khususnya dalam disiplin ilmu ekonomi, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan cara menaggulangi kemiskinan.
2. Secara Praktis, hasil penelitian ini mampu memberikan kontribusi kepada pemerintah daerah Provinsi Gorontalo dan juga dapat memberikan referensi dalam menentukan strategi atau cara yang paling tepat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat